



# ► Respons Perlindungan Sosial

Mei 2020

## ► Respons perlindungan sosial terhadap pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang: Memperkuat ketahanan dengan membangun perlindungan sosial universal

### Poin-poin utama

Pandemi COVID-19 berfungsi merupakan seruan untuk mengingatkan masyarakat global akan pentingnya mempercepat pembuatan sistem perlindungan sosial, termasuk landasan-landasannya. Para pengambil kebijakan di negara berkembang harus berupaya sedapat mungkin merancang respons krisis darurat dengan berpegang pada perspektif jangka panjang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan kerja layak, termasuk dengan mendukung transisi dari perekonomian informal ke formal.

Memastikan respons kedaruratan yang memadai dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan krisis di negara-negara berkembang membutuhkan sejumlah langkah:

- Menjamin akses ke layanan kesehatan berkualitas dengan memobilisasi dana publik tambahan untuk menggenjot anggaran sebagai bagian dari respons darurat mereka, sembari menjaga dan memperluas jangkauan mekanisme perlindungan kesehatan sosial di tengah dan di luar krisis.
- Meningkatkan jaminan pendapatan melalui bantuan tunai dengan menambah tingkat tunjangan dan memperluas jangkauan melalui program yang sudah ada atau baru; menyesuaikan persyaratan, kewajiban dan mekanisme pemberian hak; dan memastikan bahwa, jika perlu, bantuan tunai kemanusiaan dapat melengkapi dan semakin memperkuat sistem perlindungan sosial nasional.
- Melindungi pekerja di sektor informal dengan mengupayakan kebijakan inovatif untuk menjangkau mereka dengan cepat melalui kombinasi skema non-iuran dan iuran dan memfasilitasi transisi mereka ke sektor formal dalam jangka panjang.
- Memastikan perlindungan pendapatan dan pekerjaan dan mempromosikan kerja layak, dengan menggunakan skema perlindungan pengangguran dan mekanisme lain untuk membantu perusahaan dalam mempertahankan pekerja dan memberikan dukungan pendapatan kepada pekerja yang menganggur, serta menyesuaikan skema ketenagakerjaan publik dengan konteks pandemi.
- Mengkoordinasikan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial secara lebih sistematis guna mempromosikan pemulihan yang berkelanjutan.
- Memobilisasi sumber daya di tingkat nasional dan global atas dasar solidaritas dan mempertimbangkan berbagai opsi dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya-upaya perlindungan sosial di luar krisis untuk memastikan berkelanjutannya pembiayaan sistem perlindungan sosial berbasis hak.
- Merebut peluang yang diberikan oleh krisis COVID-19 ini untuk mempercepat pembentukan sistem perlindungan sosial universal, termasuk landasan.

## Pengantar dan pesan utama

Laporan singkat ini membahas peran perlindungan sosial dalam menangani krisis COVID-19 di negara-negara berkembang. Seperti krisis sebelumnya, krisis kali ini telah mengungkap konsekuensi buruk yang terjadi karena tidak adanya sistem perlindungan sosial yang dirancang dengan baik. Krisis ini juga menunjukkan kerentanan kelompok populasi yang seringkali kurang dilihat, misalnya pekerja informal atau pekerja migran (ILO 2020b, 2019d).<sup>1</sup> Meskipun hal ini terjadi di semua negara, tapi lebih khususnya di negara-negara miskin.

Perlindungan sosial merupakan bagian integral dari empat pilar utama ILO untuk melawan COVID-19 berdasarkan standar ketenagakerjaan internasional – menstimulasi ekonomi dan ketenagakerjaan; membantu perusahaan, menjamin pekerjaan dan pendapatan; melindungi pekerja di tempat kerja; dan mengandalkan dialog sosial untuk menemukan solusi. Oleh karena itu, perlindungan sosial merupakan mekanisme yang sangat diperlukan untuk memberikan bantuan kepada individu selama krisis dengan memberikan akses ke layanan kesehatan dan melindungi terhadap kehilangan pendapatan masif yang diakibatkan penurunan ekonomi paling parah sejak Perang Dunia Kedua. Dengan mempercepat pemulihan melalui kontribusi positifnya terhadap konsumsi dan permintaan agregat, perlindungan sosial juga dapat bertindak sebagai stabilisator sosial dan ekonomi (ILO 2017).

Banyak negara berkembang memperkenalkan langkah-langkah perlindungan sosial sementara dalam merespons krisis dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, melindungi pekerjaan dan mengurangi kehilangan pendapatan. Namun, pemulihan hanya akan berkelanjutan dan krisis di masa depan dikurangi jika negara-negara dapat secara progresif membangun atau mengubah langkah-langkah bantuan sementara tersebut menjadi sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan responsif terhadap guncangan, termasuk membentuk landasan perlindungan sosial, sejalan dengan hak asasi manusia dan standar jaminan sosial ILO, serta Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2020a). Negara-negara akan perlu juga untuk meningkatkan dan mempertahankan ruang fiskal untuk perlindungan sosial dan kemauan politik.

Krisis COVID-19 merupakan sebuah titik balik. Krisis ini sekali lagi mengungkapkan konsekuensi buruk dari sebuah guncangan sistemik bagi masyarakat dan perekonomian jika tidak adanya perlindungan sosial yang universal dan memadai. Meskipun virus tidak membedakan antara kaya dan miskin, dampaknya sangat tidak merata. Mereka yang lebih kaya cenderung memiliki pekerjaan dan tabungan yang aman untuk diandalkan dan akses ke perlindungan sosial dan jangkauan kesehatan, dan lebih mampu mengkarantina diri sembari terus bekerja dari jarak jauh (PBB 2020a; Oxfam 2020).

### Kotak 1: Standar ILO dan relevansinya untuk respons krisis COVID-19

Diadopsi oleh pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 187 negara anggota ILO, standar ILO memberikan panduan penting untuk kebijakan perlindungan sosial, termasuk Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102) dan Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202).

Berkenaan dengan respons kebijakan terkoordinasi pada masa krisis dan pemulihan, Rekomendasi Ketenagakerjaan dan Kerja Layak untuk Perdamaian dan Ketahanan, 2017 (No. 205) menyeru para Anggota untuk secepat mungkin melakukan hal-hal berikut:

- berupaya memastikan jaminan pendapatan dasar, khususnya bagi orang-orang yang pekerjaan atau mata pencahariannya terganggu oleh krisis;
- mengembangkan, memulihkan atau meningkatkan skema jaminan sosial komprehensif dan mekanisme perlindungan sosial lainnya, dengan mempertimbangkan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional;
- berupaya memastikan akses yang efektif ke layanan kesehatan yang esensial dan layanan sosial dasar lainnya, khususnya untuk kelompok populasi dan individu yang menjadi rentan oleh krisis;
- Untuk mencegah krisis, memungkinkan pemulihan dan membangun ketahanan, negara Anggota harus menetapkan, menetapkan kembali, atau mempertahankan landasan perlindungan sosial, serta berupaya untuk menutup kesenjangan dalam jangkauan perlindungan mereka, dengan mempertimbangkan Konvensi No. 102, Rekomendasi No. 202 dan standar ketenagakerjaan internasional lain yang relevan;
- memastikan bahwa langkah-langkah semacam itu dikembangkan atau dipromosikan melalui dialog sosial yang inklusif gender.

Membangun landasan perlindungan sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional merupakan kunci untuk pemulihan dan pencegahan krisis, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses efektif ke sekurang-kurangnya layanan kesehatan yang esensial dan jaminan pendapatan dasar sepanjang hidup mereka, sebagai langkah pertama untuk mewujudkan hak mereka atas jaminan sosial (ILO 2017, 2019b).

Sangat tidak meratanya dampak dan hasil krisis di dalam negeri dan lintas negara akan mengakibatkan meningkatnya ketidaksetaraan. Memastikan respons darurat yang memadai dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan krisis di negara-negara berkembang memerlukan sejumlah langkah:

- Menjamin akses ke layanan kesehatan berkualitas dengan memobilisasi dana publik tambahan untuk menggenjot anggaran sebagai bagian dari respons darurat, sembari menjaga dan memperluas jangkauan mekanisme perlindungan kesehatan sosial di tengah dan di luar krisis.

<sup>1</sup>Catatan pengarah tentang perlindungan sosial untuk pekerja informal dan migran sedang dalam penyusunan.

## ► Respons Perlindungan Sosial

Respons perlindungan sosial terhadap pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang

- Meningkatkan jaminan pendapatan melalui bantuan tunai<sup>2</sup> dengan meningkatkan tingkat tunjangan dan memperluas jangkauan melalui program yang sudah ada atau baru, menyesuaikan persyaratan, kewajiban dan mekanisme pemberian hak dan memastikan bahwa, jika perlu, bantuan tunai kemanusiaan dapat melengkapi dan semakin memperkuat sistem perlindungan sosial nasional.
- Melindungi pekerja di sektor informal dengan mengupayakan kebijakan inovatif untuk menjangkau mereka dengan cepat melalui kombinasi skema non-iuran dan iuran dan memfasilitasi transisi mereka ke sektor formal dalam jangka panjang.
- Memastikan perlindungan pendapatan dan pekerjaan dan mempromosikan kerja layak dengan menggunakan skema perlindungan pengangguran dan mekanisme lain untuk mendukung perusahaan dalam mempertahankan pekerja dan memberikan bantuan pendapatan kepada pekerja yang menganggur, serta menyesuaikan skema ketenagakerjaan publik dengan konteks pandemi.
- Mengkoordinasikan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial secara lebih sistematis guna mempromosikan pemulihan yang berkelanjutan.
- Memobilisasi sumber daya di tingkat nasional dan global atas dasar solidaritas dan mempertimbangkan berbagai opsi dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya-upaya perlindungan sosial di luar krisis untuk memastikan keberlanjutannya pembiayaan sistem perlindungan sosial berbasis hak.
- Merebut peluang yang diberikan oleh krisis COVID-19 ini untuk mempercepat pembentukan sistem perlindungan sosial universal, termasuk landasan-landasannya.

### Memastikan akses ke layanan kesehatan berkualitas

Terutama dalam konteks pandemi, kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas dapat menjadi masalah hidup dan mati. Maka dari itu, sangat perlu untuk menghapuskan hambatan finansial dan hambatan lain. Separuh dari populasi global tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan sekira 40 persen tidak terafiliasi dengan program yang diamanatkan secara publik yang menjamin akses terjangkau ke layanan kesehatan, dengan perbedaan yang signifikan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan (WHO dan Bank Dunia 2017; ILO 2017). Kesenjangan perkotaan-perdesaan juga terlihat jelas, misalnya tingkat jangkauan legal 50 persen lebih rendah di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan di Asia (ILO 2017).

Berbagai pengecualian perlindungan kesehatan sosial bagi populasi rentan menyebabkan mereka harus membayar layanan kesehatan dari kantong sendiri yang seringkali menghancurkan secara finansial, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (ILO 2017).

Contohnya, lebih dari 70 persen total pengeluaran kesehatan di Bangladesh, Kamerun dan Nigeria pada tahun 2017 dibayar dari kantong sendiri (WHO 2020). Di seluruh dunia, sekira 800 juta orang menghabiskan sekurang-kurangnya 10 persen dari anggaran rumah tangga mereka untuk layanan kesehatan setiap tahun dan 100 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem karena biaya medis (WHO dan Bank Dunia 2017). Krisis COVID-19 memberikan gambaran yang sangat jelas tentang pentingnya memastikan bahwa hambatan finansial tidak menghalangi akses ke pencegahan, pengujian dan layanan untuk semua.

### Memobilisasi dana publik tambahan untuk meningkatkan anggaran layanan kesehatan sebagai bagian dari respons darurat

Defisit besar dalam jangkauan kesehatan diperparah oleh kurangnya investasi dalam sistem kesehatan masyarakat dan sangat kurangnya tenaga kesehatan, yang terlihat jelas bahkan sebelum krisis saat ini (ILO 2020k). Perkiraan sebelumnya menunjukkan bahwa sektor kesehatan menghadapi defisit 17,4 juta pekerja, khususnya di negara berpendapatan rendah dan menengah bawah, yang diproyeksikan akan meningkat lebih lanjut pada tahun 2030 (Komisi Tingkat Tinggi dalam Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Pertumbuhan Ekonomi 2017). Berdasarkan kesenjangan yang ada ini, maka perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja perlu diberi prioritas tinggi (ILO 2020k). Selama epidemi Ebola di Afrika Barat, misalnya, kekurangan parah dokter dan perawat diperburuk oleh kematian di kalangan staf-staf penting lainnya karena tidak memadainya pelatihan di bidang praktik pengendalian infeksi dan kurangnya bahan pelindung (UNDP 2014). Dengan komposisi sebesar 70 persen, Meioritas pekerja kesehatan yang sekarang dianggap penting adalah perempuan, tetapi banyak dari mereka yang bekerja terlalu keras dan dibayar rendah, bekerja tanpa alat pelindung diri yang memadai dan berisiko tinggi terpapar virus (ILO 2020k, 2019a, 2018). Pada saat yang sama, beberapa negara, termasuk Kenya dan Afrika Selatan, meluncurkan kampanye perekrutan pekerja kesehatan tambahan (ILO 2020k) sebagai bagian dari serangkaian intervensi yang lebih luas.

<sup>2</sup> Bantuan tunai merujuk pada bantuan pendapatan yang diberikan kepada perorangan atau rumah tangga, dengan atau tanpa uji kemiskinan, biasanya dibiayai dengan perpajakan, pendapatan pemerintah lainnya atau hibah atau pinjaman luar negeri, termasuk dalam konteks intervensi kemanusiaan (ILO 2017). Dalam konteks krisis COVID-19, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan subsidi upah yang dibayarkan kepada perusahaan untuk mendukung retensi pekerja dalam pekerjaan.

## ► Respons Perlindungan Sosial

Respons perlindungan sosial terhadap pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang

### Menjaga dan memperluas jangkauan mekanisme perlindungan kesehatan sosial di tengah dan di luar krisis

Salah satu langkah respons pandemi yang cepat adalah dengan memastikan masyarakat dapat mengakses pengujian dan layanan virus corona secara gratis. Namun ini belum cukup. Ketika langkah-langkah semacam itu diimplementasikan, penting untuk memperkuat arsitektur pembiayaan kesehatan secara keseluruhan dengan kerangka berbasis hak yang memastikan penghapusan hambatan keuangan secara berkelanjutan melalui skema perlindungan kesehatan sosial, berdasarkan mekanisme penyatuan risiko (*risk pooling*) yang luas dan solidaritas dalam pembiayaan melalui pajak, iuran sosial atau kombinasi keduanya (ILO 2020j). Contoh negara yang mampu menjaga dan memperluas jangkauan mekanisme perlindungan kesehatan sosial selama krisis saat ini dan sebelumnya meliputi:

- Philippine Health Insurance Corporation mengeluarkan 30 miliar peso Filipina (583 juta dollar Amerika) di depan untuk rumah sakit terakreditasi sebagai bagian dari respons COVID-19 (Filipina 2020c). Lembaga ini menggunakan mekanisme penggantian sementara untuk memberikan likuiditas kepada penyedia layanan kesehatan untuk secara memadai menanggapi meningkatnya permintaan. Lembaga ini juga membentuk paket respons yang mencakup pengujian COVID, rujukan dan isolasi (Filipina 2020a).
- Thailand memperluas perlindungan keuangan terhadap pengeluaran kesehatan baik bagi warga negara maupun warga asing yang memiliki izin kerja yang sah dengan memberikan akses oleh pasien COVID-19 ke sistem jangkauan universal untuk pasien darurat. Langkah ini memungkinkan pasien mencari layanan di rumah sakit umum atau swasta terdekat secara gratis (*The Thaiger* 2020).

Selain memastikan akses, meningkatkan kesadaran tentang virus juga menjadi bagian dari respons krisis segera di Meksiko, Mozambik dan negara-negara lain.

Namun, para pengambil kebijakan harus ingat bahwa upaya mitigasi COVID-19 yang eksklusif dapat mengurangi ketersediaan sistem kesehatan untuk merespons kondisi lain yang membunuh manusia setiap hari. Selama epidemi Ebola, berkurangnya akses ke layanan kesehatan, yang juga disebabkan oleh ketakutan akan tertular virus, memperparah kematian akibat malaria, HIV/AIDS dan tuberkulosis (Parpia et al. 2016). Memastikan kapasitas yang diperlukan untuk merawat dengan aman semua kondisi lain selama krisis COVID-19 sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Selain segera menyalurkan sumber daya fiskal tambahan ke dalam sistem kesehatan, investasi berkelanjutan dalam sistem kesehatan harus dipastikan pada masa pasca krisis untuk meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas layanan kesehatan.

**Kotak 2: Respons COVID-19 Kerala : Memetik manfaat investasi dalam sistem kesehatan masyarakat dan mengikuti pendekatan yang berpusat pada manusia**

Negara bagian Kerala di India, dengan populasi 35 juta, telah mengikuti respons COVID-19 yang terkoordinasi dan efektif. Pemerintah negara bagian tersebut merupakan salah satu yang pertama yang memperkenalkan langkah pencegahan seluruh negara bagian terhadap ancaman virus pada awal Januari 2020, berdasarkan pengalamannya dengan wabah epidemi di masa lalu (virus Zika, demam kuning dan wabah virus Nipah 2018). Dengan tingkat pengeluaran kesehatan publik yang relatif tinggi (5,5 persen dari total pengeluaran pada 2020-2021), sistem layanan kesehatan Kerala menempati peringkat terbaik di India dan memiliki konsentrasi pekerja kesehatan tertinggi kedua, setelah ibu kota, New Delhi (66 per 10.000 populasi dibandingkan dengan rata-rata nasional 29 per 10.000) (Karan et al. 2019). Dengan memperkuat sistem kesehatan publiknya, Kerala mampu merespons krisis COVID-19 dengan lebih baik dan lebih koheren daripada negara bagian lain. Negara bagian ini juga mengikuti "pendekatan semua-pemerintah, semua-masyarakat" yang mencakup lembaga pemerintahan, jaringan komunitas dan serikat pekerja lokal.

Selain respons kesehatan publiknya, Kerala juga memperhatikan dampak ekonomi dan sosial krisis tersebut, sehingga memastikan komunikasi yang baik dan keterlibatan mitra sosial dan pelaku terkait lainnya di semua tingkatan (Swaminathan dan Johnson 2020). Segera setelah lockdown diumumkan, paket bantuan diluncurkan, termasuk distribusi barang-barang makanan ke semua rumah tangga yang memiliki kartu ID nasional (kartu Aadhaar) dan pemberian layanan dasar bagi mereka yang membutuhkan. Langkah-langkah ini dilengkapi dengan dukungan pendapatan, misalnya pembayaran uang muka pensiun hari tua, janda atau disabilitas dan bantuan tunai ke pekerja mandiri dan pekerja informal, serta pinjaman yang diberikan melalui koperasi perempuan dan penyediaan pekerjaan melalui program jaminan pekerjaan perdesaan.

Hal ini juga mencakup peningkatan kondisi kerja di sektor kesehatan untuk menarik dan mempertahankan staf berkualitas dan mengatasi kekurangan endemik dokter, perawat, dan personel lainnya. Selain menyelamatkan hidup, memastikan kesejahteraan dan kemampuan manusia, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk krisis di masa depan, investasi semacam itu juga merupakan mesin penting untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas (ILO 2018, 2020k).

Meskipun memiliki kepadatan populasi yang tinggi dan tingkat migrasi internasional yang tinggi yang dapat meningkatkan penyebaran virus, negara bagian Kerala di India telah menunjukkan respons terpadu terhadap krisis yang dibangun berdasarkan investasi dalam sistem layanan kesehatan publik yang dibuat selama 15 tahun terakhir, serta keterlibatan efektif mitra sosial (lihat **kotak 2**).

### Meningkatkan jaminan pendapatan melalui bantuan tunai dan tunjangan lainnya

Krisis COVID-19 telah mengungkap konsekuensi buruk dari kesenjangan perlindungan sosial di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah. Masalah ini sangat relevan mengingat 55 persen populasi dunia – sebanyak 4 miliar orang – tidak terlindungi oleh skema asuransi sosial atau oleh program bantuan universal atau sosial (ILO 2017). Di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah bawah, jangkauan perlindungan sosial dalam kasus kehilangan penghasilan karena sakit, pengangguran atau kehilangan mata pencaharian tidak tersedia atau tidak memadai (ILO 2020g). melihat kurangnya sistem yang ada, banyak negara telah berusaha untuk segera menutup kesenjangan perlindungan dan menyediakan bantuan tunai satu kali atau reguler kepada populasi terdampak. Pembayaran ini dapat diselenggarakan dengan menyesuaikan dan meningkatkan bantuan sosial atau skema terkategori yang telah ada, misalnya skema untuk kelompok populasi luas tertentu, termasuk anak-anak (ILO dan UNICEF 2019), serta program non-iuran dan asuransi sosial lain, untuk mendukung kelompok populasi yang sebelumnya tidak dicakup.<sup>3</sup> Dalam beberapa konteks, intervensi kemanusiaan diperlukan untuk menutup kesenjangan perlindungan.

### Meningkatkan kecukupan tunjangan untuk meredam guncangan awal dan membantu pemulihan

Baik di saat krisis maupun di saat stabil, jaminan pendapatan harus dapat memberikan sumber daya untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, terutama dalam krisis yang diperkirakan akan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang panjang, sangat penting untuk memastikan memadainya tunjangan mengingat hilangnya pendapatan yang signifikan dan terjadinya peningkatan biaya hidup. Hingga saat ini, 76 negara telah meningkatkan tingkat tunjangan perlindungan sosial mereka sebagai respons COVID-19 (ILO 2020c). Namun, peningkatan tersebut sementara mungkin tidak cukup untuk menangani krisis berkepanjangan dan negara-negara mungkin perlu meninjau kembali pengaturan ini untuk mempertahankan kecukupan tunjangan, yang mungkin memerlukan perluasan ruang fiskal lebih lanjut.

- Di Cina, pemerintah daerah diinstruksikan untuk meningkatkan jumlah tunjangan skema bantuan sosial nasionalnya (Dibao) untuk semua penerima manfaat atau mereka yang terinfeksi, tergantung pada provinsi (ILO 2020i; Gentilini, Almenfi, dan Dale 2020).

- Indonesia meningkatkan jumlah tunjangan program sembako murah sebesar sepertiga selama sembilan bulan (Nugroho 2020).
- Afrika Selatan meningkatkan jumlah Bantuan Nafkah Anak untuk setiap anak sebesar 300 rand Afrika Selatan (16 dolar Amerika) pada bulan Mei, sementara dari Juni hingga Oktober setiap pengasuh akan menerima R500 tambahan (27 dolar Amerika) per bulan, tanpa memandang jumlah anak yang dirawat. Semua penerima bantuan lainnya akan menerima R250 tambahan (14 dolar Amerika) untuk enam bulan ke depan (Shange 2020; Afrika Selatan 2020a).
- Jamaika menyesuaikan program pembangunannya melalui kesehatan dan pendidikan dan memberikan bantuan gizi kepada siswa selama penutupan sekolah. Meskipun makanan pertama kali diberikan secara non-tunai dan dapat diambil pada berbagai titik distribusi, keluarga sekarang akan menerima pembayaran tunai selama sekolah tutup untuk mengurangi waktu dan biaya perjalanan mereka (Jamaica 2020).

### Memperluas jangkauan melalui program yang ada atau baru untuk memastikan semua orang memiliki akses ke perlindungan sosial

Di seluruh dunia, 58 negara memperluas jangkauan tunjangan yang ada dan 121 memperkenalkan tunjangan baru untuk kelompok populasi rentan (ILO 2020c). Bila memungkinkan, respons cepat dapat diterapkan dengan memperluas jangkauan program yang ada, misalnya dengan mendefinisikan ulang kriteria kelayakan, termasuk mekanisme penargetan yang lebih inklusif. Dengan didasarkan pada struktur administrasi yang telah ada, misalnya pangkalan data dan mekanisme penyampaian, perluasan program memungkinkan pengguliran tunjangan secara cepat. Namun, hal ini hanya mungkin dilakukan di negara-negara yang telah membangun sistem pendaftaran tunggal yang tidak hanya menjangkau kaum miskin ekstrem tetapi juga bagian populasi yang lebih besar. Efektivitas program dan skema untuk mengentaskan dan mengurangi kemiskinan dan kekurangan ini tergantung pada kemampuannya untuk secara cepat menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan tambahan, serta jangka waktu program dan skema tersebut akan dipertahankan. Anggaran yang dialokasikan untuk respons perlindungan sosial tidak dapat mencakup kelompok-kelompok tambahan semacam itu secara berkala dan bulanan dan yang biasanya berupa sekali pembayaran.

<sup>3</sup> Untuk ikhtisar respons negara, lihat ILO, "Social Protection Responses to COVID-19 Crisis Around the World", yang diperbarui setiap minggu. Lihat juga ILO (2020c)

## ► Respons Perlindungan Sosial

Respons perlindungan sosial terhadap pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang

Krisis ini terutama berdampak pada mereka yang sampai saat ini tidak ditanggung oleh asuransi sosial atau bantuan sosial atau disebut “kelas menengah yang terlewat”. Bergantung pada konteks negara, mereka dapat meliputi pekerja kontrak, pekerja paruh waktu dan pekerja mandiri, serta rumah tangga yang dianggap tidak “cukup miskin” untuk memenuhi syarat mendapatkan tunjangan bantuan sosial (ILO 2019c). Krisis ini juga telah mengungkapkan kerentanan mereka yang berada di sektor formal yang tidak tercakup secara memadai, misalnya jutaan pekerja garmen yang kehilangan pekerjaan karena penurunan permintaan secara tiba-tiba, termasuk putusnya rantai pasokan global, tanpa menerima tunjangan apa pun setelah mereka diberhentikan di negara-negara yang tidak memiliki skema asuransi pengangguran misalnya Bangladesh.

- Di Ekuador, pemerintah memberlakukan “tunjangan kontinjensi” khusus COVID-19, yang ditujukan bagi pekerja yang terinfeksi dan yang terdampak di sektor informal dan keluarganya. Tunjangan ini didistribusikan melalui saluran program bantuan sosial yang ada (El Mercurio 2020).
- Di Argentina, tunjangan tunai satu kali sama rata sebesar 10.000 peso Argentina (150 dolar Amerika) diberikan pada bulan April kepada satu anggota rumah tangga melalui saluran yang ada di lembaga jaminan sosial nasional yang bertanggung jawab memberikan tunjangan keluarga. Bantuan ini mencakup pekerja dalam kategori rentan, misalnya pekerja rumah tangga baik dalam ketenagakerjaan formal maupun informal, serta pekerja mandiri (Argentina 2020).
- Di Maroko, pekerja yang sakit dan menganggur yang dicakup oleh asuransi sosial melalui administrasi jaminan sosial nasional menerima tunjangan bulanan sebesar 2.000 dirham (204 dolar Amerika) antara bulan Maret dan Juni; rumah tangga yang dicakup oleh program bantuan medis nasional dapat mengajukan permohonan bantuan tunai (jumlah bervariasi berdasarkan ukuran rumah tangga) melalui SMS. Pada langkah kedua, orang-orang terdampak yang beroperasi di sektor informal yang tidak tercakup di bawah program ini akan menerima bantuan pendapatan serupa (Forbes 2020).

Dalam konteks di mana kapasitas administrasi terbatas dan sebagian besar penduduk rentan, penargetan efektif itu sulit dilakukan bahkan di masa normal. Selama pandemi, beberapa metode penargetan kemiskinan yang memerlukan pertemuan tatap muka bahkan dapat menimbulkan risiko kesehatan.

Krisis ini juga menjadikan uji kemiskinan yang ada tidak valid karena korelasi kemiskinan juga telah berubah. Keterbatasan penargetan kemiskinan yang sempit secara umum, bersamaan dengan meningkatnya kerentanan populasi yang sebelumnya tidak terjangkau, menunjukkan bahwa program dan skema universal atau kategoris atau pendekatan geografis harus dipilih bila memungkinkan. Di negara-negara berkembang, perluasan sederhana selama krisis ini ke arah penyediaan yang lebih universal, baik dalam jangka pendek atau menengah, contohnya:

- Pemerintah Cabo Verde memperluas program pendapatan sosialnya yang ditargetkan pada kemiskinan untuk inklusi darurat selama satu bulan (*Rendimento Social de Inclusão Emergencial*) dari 4.500 rumah tangga ke 2.788 rumah tangga tambahan yang sangat miskin yang memiliki minimal satu anak berusia 15 atau lebih, memberikan 5.500 escudos Cabo Verde (54 dolar Amerika) (Cabo Verde 2020).
- Uzbekistan memperpanjang sementara durasi tunjangan sosialnya untuk keluarga berpenghasilan rendah dengan tambahan enam bulan sejak bulan Juni yang dibiayai oleh dana krisis nasional. Pemerintah juga berupaya melonggarkan kriteria kelayakan sehingga jangkauan dapat diperluas ke lebih banyak keluarga, termasuk mereka yang telah mendaftar sebelumnya tetapi tidak dimasukkan karena kurangnya dana pada saat itu. Ini berpotensi menghasilkan 120.000 rumah tangga tambahan atau lebih yang dicakup (Gentilini, Almenfi, dan Dale 2020).

### ► Kotak 3: Kalkulator Perlindungan Sosial Cepat untuk COVID-19

Respons perlindungan sosial terhadap krisis ini membutuhkan penilaian yang memadai tentang biaya yang dikeluarkan. Pada masa “normal”, penilaian semacam itu dapat dipersiapkan dengan baik di depan dan didasarkan pada informasi yang komprehensif dan model aktuarial yang canggih. Namun, dalam konteks krisis COVID-19, tindakan segera dan tegas mungkin diperlukan. Untuk mendukung pengambil kebijakan, Departemen Perlindungan Sosial ILO telah mengembangkan [Kalkulator Perlindungan Sosial Cepat untuk COVID-19](#). Berdasarkan seperangkat parameter minimum, pengguna dapat membiayai beberapa opsi kebijakan, misalnya perluasan jangkauan skema yang ada untuk penerima manfaat baru; peningkatan tingkat manfaat saat ini; dan pengenalan tunjangan universal atau kategorikal lump-sum atau subsidi upah sementara.

## ► Respons Perlindungan Sosial

Respons perlindungan sosial terhadap pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang

### Menyesuaikan syarat mendapatkan dan kewajiban untuk memastikan akses tunjangan yang mudah dan aman

- Program bantuan tunai unggulan Filipina menanggukuhkan persyaratannya terkait dengan kehadiran di sekolah dan kunjungan kesehatan selama empat bulan (Februari-Mei) terhadap kualifikasi untuk penerimaan tunjangan tunai, ditambah dengan subsidi darurat sebesar 3.650 hingga 6.650 peso Filipina (72– 132 dolar Amerika) sebulan (Filipina 2020c).
- Rwanda menyesuaikan komponen pekerjaan umum dalam program perlindungan sosial unggulannya. Program tersebut untuk sementara menghapus persyaratan kerja untuk penerima manfaat pekerjaan umum, sembari tetap membayar bantuan tunai dan menghormati jaga jarak fisik (Mujawase 2020).

### Menyesuaikan mekanisme pendaftaran, pencairan, modalitas tunjangan, dan periodisitas pembayaran untuk meningkatkan pemberian perlindungan yang efektif

Sebagai reaksi terhadap pandemi, setidaknya 45 negara telah meningkatkan mekanisme pencairannya dan 27 telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses (ILO 2020c). Mengingat perlunya tindakan cepat, prosedur administrasi yang disederhanakan dan komunikasi yang efisien yang menggunakan panduan sederhana atau multibahasa dapat mendukung akses ke tunjangan dan percepatan pengambilan. Sebisa mungkin, poin pendaftaran atau klaim tunjangan harus dapat diakses secara daring atau melalui telepon untuk memfasilitasi jaga jarak fisik<sup>4</sup>, sementara mekanisme alternatif harus tersedia bagi mereka yang tidak bisa menggunakan teknologi semacam itu. Dalam beberapa keadaan, mekanisme penyampaian juga harus dimodifikasi, misalnya dengan mengantarkan makanan sekolah ke rumah-rumah atau menggantinya dengan tunjangan tunai atau kupon. Memajukan pembayaran tunjangan tunai dapat memberikan kepada rumah tangga yang terdampak jumlah uang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan mengurangi paparan fisik saat mengambil pembayaran tunjangan. Namun, jika tingkat tunjangan tidak meningkat, penerima mungkin mengalami kesulitan setelah membelanjakan jumlah tunjangan tersebut.

- Penerima pensiun sosial di Aljazair diizinkan untuk memilih penerima kuasa untuk mengambil tunjangan mereka, sehingga mengurangi risiko orang tua terpapar virus (Gentilini, Almenfi, dan Dale 2020).
- Brasil memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum terdaftar dalam daftar perlindungan sosial nasional tunggal untuk mendaftar melalui situs web atau aplikasi telepon untuk mengakses

tunjangan darurat tiga bulan yang diujicobakan bagi pekerja yang menganggur dan pengusaha mikro (baik formal maupun informal) (Brazil 2020). Di beberapa negara bagian, termasuk Distrik Federal, makanan sekolah diganti dengan bantuan tunai selama penutupan sekolah.<sup>5</sup>

- Beberapa negara, misalnya Argentina dan Peru, memajukan pembayaran tunjangan hari tua dan disabilitas dan/atau meningkatkan tingkatnya (ILO 2020h).

### Memastikan intervensi bantuan tunai kemanusiaan diselaraskan dengan, melengkapi, dan semakin memperkuat sistem perlindungan sosial nasional

Bila sistem perlindungan sosial nasional tidak memadai, intervensi kemanusiaan mungkin diperlukan untuk mengisi kesenjangan selama krisis COVID-19. Bantuan tunai dan intervensi lain yang diberikan oleh aktivis kemanusiaan dapat memberikan bantuan darurat untuk membantu masyarakat mengurangi dampak negatif krisis. Sedapat mungkin, intervensi semacam itu harus diselaraskan dengan, didasarkan pada, melengkapi dan memperkuat sistem perlindungan sosial nasional untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi COVID-19 pada populasi rentan, tanpa satu orang pun tertinggal.<sup>6</sup> Koordinasi semacam itu sangat penting untuk memaksimalkan pemberian bantuan kepada populasi terdampak sembari menghindari fragmentasi atau duplikasi dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas.

Meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi warganya sangat penting untuk strategi pemulihan jangka panjang, terutama dalam konteks kerapuhan yang berlarut-larut.

- Pemerintah Somalia meluncurkan program Baxnano untuk memberikan – untuk pertama kalinya – bantuan tunai kepada 1,3 juta rumah tangga miskin dan rentan. Program ini merupakan bagian dari visi Pemerintah untuk bergeser dari intervensi kemanusiaan dan memberikan tunjangan perlindungan sosial. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial, bekerjasama dengan WFP dan UNICEF (Horn Observer 2020).
- Irak memperkenalkan bantuan bulanan sementara (253 dolar Amerika) untuk memberi manfaat kepada berbagai kelompok yang sangat terdampak oleh jam malam nasional (Irak 2020).

<sup>4</sup> Di negara-negara dengan penetrasi telepon seluler yang tinggi di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah, solusi ini mendukung protokol jaga jarak fisik dan memiliki biaya transaksi yang rendah.

<sup>5</sup> Lihat Brazil, Departemen Pendidikan Negara, Decreto No. 40.523, 15 Maret 2019.

<sup>6</sup> Ini sejalan dengan dokumen yang disiapkan oleh Grand Bargain tentang peningkatan hubungan antara uang tunai kemanusiaan dan perlindungan sosial untuk respons yang efektif terhadap pandemi COVID-19.

## ► Respons Perlindungan Sosial

Respons perlindungan sosial terhadap pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang

### Melindungi pekerja di sektor informal

Salah satu tantangan bagi pengambil kebijakan adalah bagaimana cara memberikan bantuan kepada 1,6 miliar pekerja sektor informal, atau sekitar 76 persen dari pekerjaan informal di seluruh dunia dan sangat terdampak oleh langkah lockdown dan/atau bekerja di sektor-sektor yang paling terpukul (ILO 2020f).<sup>7</sup> Tanpa mekanisme perlindungan sosial yang tepat yang mencakup pekerja dalam segala bentuk pekerjaan, termasuk pekerja mandiri, jutaan pekerja akan jatuh ke dalam kemiskinan – atau jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan – karena pendapatan mereka menurun tajam akibat pandemi.<sup>8</sup>

### Mengupayakan kebijakan inovatif untuk dengan cepat menjangkau pekerja terdampak dan keluarganya, dalam segala bentuk pekerjaan

Sifat pandemi ini menuntut implementasi kebijakan yang cepat dan efektif dalam skala yang cukup besar untuk menjangkau sejumlah besar orang yang terdampak, termasuk di daerah perdesaan (ILO 2020b; FAO 2020). Kebijakan inovatif yang memungkinkan bantuan pendapatan untuk disalurkan kepada pekerja terdampak dan keluarganya melalui mekanisme pendaftaran, identifikasi dan penyampaian yang praktis dan aman adalah kunci untuk perluasan jangkauan yang cepat kepada pekerja di sektor informal.

Jika tersedia, mekanisme identifikasi yang ada, misalnya pangkalan data jaminan sosial, pendaftaran tunggal<sup>9</sup>, kartu kesehatan dan register pajak daerah, dapat digunakan untuk menjangkau pekerja semacam itu. Dengan peraturan jaga jarak fisik di banyak negara, modalitas pendaftaran yang sesuai dan mudah diakses harus digali. Di negara-negara dengan penetrasi telepon seluler atau internet yang luas, teknologi digital dapat memfasilitasi identifikasi dan pendaftaran penerima (ILO 2019c). Bekerja bersama organisasi pekerja informal, misalnya asosiasi pengrajin, pengemudi taksi atau becak, pedagang kaki lima, koperasi pemulung, serikat pekerja rumah tangga dan jaringan pekerja berbasis rumahan, akan memberikan informasi desain dan implementasi langkah-langkah bantuan semacam itu (Alfers 2020; WIEGO 2020b).

► Respons krisis Vietnam meliputi pemberian bantuan tunai kepada perorangan yang kehilangan pekerjaan tetapi tidak memenuhi syarat untuk asuransi pengangguran, termasuk kategori pekerja yang lazimnya memiliki tingkat informalitas tinggi, misalnya pedagang kaki lima atau pemulung. Selain itu, usaha keluarga dengan

pendapatan deklarasi pajak kurang dari 100 juta dong (4.200 dolar Amerika) per tahun yang harus menghentikan sementara usahanya diberikan bantuan tunai, sehingga berpotensi menjangkau pekerja formal dan informal di usaha kecil ini.

- Respons krisis Vietnam meliputi pemberian bantuan tunai kepada perorangan yang kehilangan pekerjaan tetapi tidak memenuhi syarat untuk asuransi pengangguran, termasuk kategori pekerja yang lazimnya memiliki tingkat informalitas tinggi, misalnya pedagang kaki lima atau pemulung. Selain itu, usaha keluarga dengan pendapatan deklarasi pajak kurang dari 100 juta dong (4.200 dolar Amerika) per tahun yang harus menghentikan sementara usahanya diberikan bantuan tunai, sehingga berpotensi menjangkau pekerja formal dan informal di usaha kecil ini.
- Kosta Rika memperkenalkan tunjangan darurat baru (Bono Proteger) yang memberikan, selama tiga bulan, tunjangan bulanan sebesar 125.000 colon (220 dolar Amerika) untuk karyawan dan pekerja mandiri (baik formal maupun informal) yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian dan 62.500 colon (110 dolar Amerika) bagi mereka yang bekerja dengan pengurangan jam kerja (Kosta Rika 2020). Penjangkauan disediakan melalui aplikasi telepon yang digunakan oleh 90 persen pekerja yang memenuhi syarat.
- Bantuan Pendapatan Darurat Namibia memberikan tunjangan satu kali sebesar 750 dolar Namibia (US\$ 41) untuk mendukung pekerja yang kehilangan pekerjaan dan tidak mendapat tunjangan dari bantuan lain (WIEGO 2020a). Pemerintah menggunakan mekanisme pendaftaran yang sederhana, misalnya teknologi seluler, dan dana dikeluarkan dengan cepat, dengan lebih dari 500.000 penerima manfaat dibayar dalam waktu tiga minggu. Respons tersebut juga memanfaatkan sistem perlindungan sosial yang dirancang dengan baik yang telah ada berdasarkan pada pemberian ID nasional untuk warga negara (Namibia 2020).

### Memastikan koordinasi antara berbagai elemen sistem perlindungan sosial, termasuk skema non-iuran dan iuran

Bergantung pada struktur kelembagaan yang ada, penjangkauan ke pekerja informal dapat dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, termasuk program bantuan tunai dan asuransi sosial. Komponen penting respons krisis yang dirancang dengan baik adalah koordinasi antara semua skema dan lembaga perlindungan sosial – baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah – yang membentuk sistem perlindungan sosial suatu negara.

<sup>7</sup> Mayoritas besar pekerja ini (lebih dari 95 persen) bekerja di unit-unit kurang dari sepuluh pekerja, baik sebagai pekerja upahan di usaha mikro atau sebagai pekerja mandiri. Perempuan terlalu banyak di sektor-sektor berisiko tinggi, misalnya perdagangan ritel, manufaktur, dan akomodasi serta layanan makanan.

<sup>8</sup> ILO memperkirakan bahwa pendapatan untuk pekerja informal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah diperkirakan akan menurun di bulan pertama krisis sebesar 82 persen dibandingkan dengan pendapatan sebelum krisis, yang menghantarkan pada penambahan kemiskinan yang signifikan dan di banyak kasus kelaparan dan kemelaratan (ILO 2020d).

<sup>9</sup> Registri terpadu semua orang atau rumah tangga yang terdaftar dalam program atau skema berbeda.



## ► Respons Perlindungan Sosial

Respons perlindungan sosial terhadap pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang

Pendekatan terpadu semacam itu diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh populasi dicakup secara komprehensif dan memadai. Hal ini juga harus mencakup koordinasi dengan langkah-langkah lain yang relevan, termasuk yang diperkenalkan oleh para aktivis kemanusiaan.

Dalam konteks krisis saat ini, membuat kaitan antara skema non-iuran dan iuran juga dapat memfasilitasi transisi pekerja dan perusahaan ke sektor formal, sejalan dengan Rekomendasi Transisi dari Perekonomian Informal ke Formal, 2015 (No. 204).

Memfasilitasi transisi semacam itu tidak hanya penting dalam hal memberikan perlindungan sosial yang memadai dan komprehensif untuk semua tetapi juga akan menciptakan ruang fiskal tambahan di masa depan melalui iuran jaminan sosial dan basis pajak yang lebih luas.

- Di Mozambik, diusulkan untuk memberikan bantuan kepada pekerja mandiri yang berpenghasilan rendah melalui afiliasi mereka ke lembaga jaminan sosial nasional. Selain memperluas perlindungan sosial ke pekerja di sektor informal selama krisis, mekanisme tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi paket perlindungan sosial yang disesuaikan untuk pekerja mandiri dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan insentif pekerja untuk mendaftar dan membayar iuran.<sup>10</sup>
- Di Togo, Pemerintah dengan cepat menerapkan program bantuan tunai yang menargetkan pekerja di sektor informal perkotaan, yang memberikan 12.500 franc CFA (21 dolar Amerika) per bulan kepada perempuan dan 10.000 franc CFA (17 dolar Amerika) per bulan kepada laki-laki, mencapai lebih dari setengah juta pekerja dalam satu bulan. Saat ini, sedang dibahas bagaimana membangun langkah ini dan mendorong pekerja informal untuk bergabung dengan skema asuransi sosial untuk pekerja mandiri dan informal yang direncanakan sebelum krisis dan diharapkan akan diluncurkan pada tahun 2020 (Togo 2020).

Pendekatan semacam itu mendukung kerja layak dan memperkuat ketahanan pekerja perorangan dan ekonomi melalui mekanisme yang disesuaikan yang memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja di semua jenis pekerjaan dan keluarganya.<sup>11</sup>

### Melindungi pendapatan dan pekerjaan dan mempromosikan kerja layak

Krisis saat ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dan jam kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkiraan ILO menunjukkan bahwa jam kerja akan menurun sebesar 10,5 persen pada kuartal

kedua 2020 dibandingkan dengan kuartal terakhir sebelum krisis (kuartal terakhir 2019), setara dengan 305 juta pekerjaan penuh waktu (ILO 2020f).

Dampak pendapatan dari guncangan ini pada pekerja tidak merata dan berbeda-beda tergantung pada sektor pekerjaan, serta tingkat informalitas dan jangkauan perlindungan sosial (ILO 2020f). Pada saat yang sama, pengalaman saat ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial dapat digunakan untuk mendukung retensi pekerjaan atau meningkatkan akses pekerja ke peluang kerja baru. Pendekatan terkoordinasi antara perlindungan sosial, kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan program penciptaan lapangan kerja sangat penting untuk mencapai pemulihan yang kuat, cepat dan berkelanjutan.

Beberapa negara berkembang dapat menggunakan skema perlindungan pengangguran<sup>12</sup> untuk mendukung perusahaan dalam mempertahankan pekerja selama ambruknya perekonomian dan memberikan jaminan pendapatan bagi pekerja yang menganggur. Sebelum krisis saat ini, hanya 20 persen penganggur di seluruh dunia yang dicakup oleh tunjangan pengangguran, meninggalkan 152 juta pekerja menganggur tanpa jangkauan. Tingkat jangkauan sangat rendah di Afrika (5,6 persen) dan Amerika (16,7 persen) (ILO 2017). Namun demikian, bila skema semacam itu ada, skema itu digunakan untuk mengurangi dampak krisis melalui berbagai langkah.

### Melindungi pendapatan dan pekerjaan dan mempromosikan kerja layak

Beberapa negara menggunakan skema perlindungan pengangguran dan mekanisme lain untuk mendukung perusahaan dalam mempertahankan pekerja agar tetap bekerja, sehingga menghindari PHK karena adanya penurunan sementara dalam permintaan dan mendukung pemulihan yang cepat (ILO 2020e; 2020h).

- Asuransi ketenagakerjaan Malaysia memberikan program subsidi upah untuk membantu pemberi kerja mempertahankan pekerja mereka, dengan memberikan antara 600 hingga 1.200 ringgit Malaysia (138 hingga 277 dolar Amerika) per bulan, tergantung pada ukuran perusahaan, selama hingga tiga bulan bagi pekerja yang berpenghasilan hingga 4000 ringgit (923 dolar Amerika). Perusahaan yang mendapatkan bantuan akan diminta untuk mempertahankan karyawan mereka selama minimal enam bulan (Malaysia 2020b).

<sup>10</sup> Informasi disediakan oleh kantor ILO Mozambik.

<sup>11</sup> Paket sumberdaya kebijakan ILO tentang perluasan jaminan sosial kepada pekerja di sektor informal (ILO 2019c) memberikan panduan praktis dalam hal ini untuk mencakup pekerja di semua jenis pekerjaan, termasuk pekerja rumah tangga (ILO 2019d), pekerja di usaha kecil dan usaha mikro (ILO 2019f) dan pekerja mandiri (ILO 2019e).

<sup>12</sup> Catatan pengarah yang lebih rinci tentang topik ini sedang dalam penyusunan.

## ► Respons Perlindungan Sosial

Respons perlindungan sosial terhadap pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang

- Di Republik Dominika, perusahaan yang terdampak oleh lockdown dan terdaftar pada perbendaharaan jaminan sosial dapat menerima subsidi upah 70 persen dari upah mereka, dari 5.000 hingga 8.500 peso Dominika (90 hingga 160 dolar Amerika) per karyawan setiap bulan (Dominican Today 2020).

### Menggunakan skema perlindungan pengangguran dan mekanisme lain untuk memberikan bantuan pendapatan kepada mereka yang menjadi pengangguran

Skema perlindungan pengangguran memberikan saluran bantuan penting bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan mekanisme semacam itu telah diperluas ke lebih banyak pekerja selama krisis:

- Di Thailand, 13,3 juta pekerja sektor formal yang terdaftar di bawah administrasi jaminan sosial berhak menerima tunjangan pengangguran jika mereka menjadi menganggur. Hak ini akan ditingkatkan selama 2020-2021 untuk memberikan 70% gaji selama 200 hari (sebelumnya 50% gaji selama 180 hari). Pekerja yang sedang cuti tanpa upah karena instruksi pemerintah untuk menutup sementara bisnis mereka akan menerima penghasilan pengganti 50% gaji hingga 60 hari (ILO 2020a).
- Di Afrika Selatan, dana asuransi pengangguran memberikan kompensasi kepada pekerja yang terdampak dengan tunjangan bencana nasional baru. Pemberi kerja dapat mengajukan atas nama karyawan, untuk mengurangi beban administrasi dana tersebut. Tunjangan dengan besaran rata setara dengan upah minimum 200 dolar Amerika per karyawan dibayarkan selama 21 hari untuk menutup sebagian dari periode penutupan nasional atau hingga periode maksimal tiga bulan. Jika seorang karyawan sakit atau menganggur lebih dari tiga bulan, tunjangan pengangguran normal berlaku (Afrika Selatan 2020b).

Tetap saja, sebagian besar negara berkembang perlu segera mengambil langkah-langkah untuk memberikan bantuan pendapatan kepada pekerja yang menganggur di sektor-sektor yang terdampak. Krisis ini dengan jelas menunjukkan kurangnya tunjangan pengangguran. Contohnya, industri garmen di Bangladesh, Kamboja, Etiopia, India, Indonesia, Myanmar, Pakistan, dan negara-negara lain mengalami konsekuensi dari pembatalan dan penangguhan pesanan. Seruan aksi COVID-19 di industri garmen<sup>13</sup> mendesak penguatan perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk tunjangan pengangguran dan skema retensi pekerjaan.

### Menyesuaikan skema ketenagakerjaan publik untuk memberikan pendapatan tanpa persyaratan kerja atau dengan cermat mengubah konten dan organisasi kerja untuk konteks pandemi

Program ketenagakerjaan publik dapat bertindak sebagai ekuivalen fungsional skema perlindungan pengangguran dengan menjamin sejumlah minimum hari kerja dan/atau upah untuk hari kerja yang setara untuk mendukung jaminan pendapatan (ILO 2017). Namun, tantangan terkait dengan lockdown dan perlunya melindungi kesehatan pekerja, misalnya jaga jarak fisik, menuntut penyesuaian cara program-program ini biasanya dirancang (ILO 2020).

Dalam konteks penutupan sekolah karena COVID-19, mungkin sangat penting bagi pengasuh primer yang merupakan pekerja non esensial, baik perempuan maupun laki-laki, untuk menerima pembayaran tunai tanpa persyaratan kerja.

Contohnya meliputi:

- Etiopia telah mengubah program jaring pengaman produktifnya untuk memungkinkan peserta menerima pembayaran tiga bulan di muka dan pada saat yang sama menghapuskan kewajiban kerja untuk periode itu. Tunjangan bantuan pendapatan serupa telah diperluas ke kelompok berpenghasilan rendah lainnya (Gentilini, Almenfi, dan Dale 2020).
- Filipina memperkenalkan program ketenagakerjaan publik (Program Pekerja Kurang Beruntung) untuk mengurangi dampak buruk kebijakan karantina terhadap pekerja tertentu, yang memberikan kepada 220.320 peserta 100 persen upah minimum regional tertinggi yang berlaku hingga 10 hari. Pekerja penerima diminta untuk berpartisipasi dalam orientasi keselamatan dan mensanitasi dan mendisinfeksi rumah mereka dan daerah sekitarnya (Filipina 2020d).

Karena pandemi COVID-19 kemungkinan memiliki implikasi kesehatan dan layanan sosial jangka panjang, program ketenagakerjaan publik juga harus mencakup komponen layanan sosial yang memberikan kondisi kerja layak bagi pekerja yang menganggur dan memenuhi kebutuhan mendesak. Pengenalan komponen layanan sosial dalam program pekerjaan umum Afrika Selatan yang diperluas, termasuk pengasuhan anak dan layanan berbasis rumah, merupakan inovasi penting (Kelombang dan Ong 2018). Komponen ini kemungkinan menguntungkan perempuan secara langsung karena banyak peluang kerja di sektor sosial diambil oleh mereka, sekaligus juga mengurangi beban perawat keluarga tidak berbayar. Meskipun upah pada tahun 2008-2009 di sektor sosial tempat perempuan mendominasi jauh lebih rendah daripada di komponen infrastruktur tempat laki-laki mendominasi, masalah tersebut sebagian ditangani di tahap kedua program dengan memperkenalkan upah minimum dan menyesuaikan dengan inflasi secara tahunan (UN Women 2015).

<sup>13</sup> Seruan aksi COVID-19: *Action in The Global Garment Industry* dinegosiasikan oleh IOE, ITUC, dan IndustriALL Global Union, dengan dukungan teknis ILO, dan telah didukung hingga saat ini oleh 58 merek dan pabrikan, organisasi pekerja, dan organisasi lainnya.

Program ketenagakerjaan publik juga dapat digunakan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari investasi untuk pemulihan yang diarahkan oleh infrastruktur. Misalnya, skema jaminan ketenagakerjaan perdesaan nasional Mahatma Gandhi di India membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui konservasi air, pencegahan kekeringan, reboisasi, dan kegiatan pengendalian banjir.

### **Mengkoordinasikan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial dengan cara yang lebih sistematis untuk mendorong pemulihan berkelanjutan**

Di luar program ketenagakerjaan publik, momen yang secara unik menantang ini dapat memaksa perubahan paradigma dalam koordinasi kebijakan ekonomi, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, sosial dan lingkungan.<sup>14</sup> Koordinasi perlindungan pengangguran dengan kebijakan pengembangan keterampilan sensitif gender dan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik, termasuk pelatihan keterampilan ulang dan peningkatan keterampilan, konseling pribadi atau bantuan penempatan telah diserukan sebelum pandemi (Komisi Global untuk Masa Depan Pekerjaan 2019) dan dapat digunakan untuk mendukung pemulihan dengan mempersiapkan pekerja dengan lebih baik untuk realitas pasar tenaga kerja baru setelah krisis COVID-19.

- Sistem asuransi ketenagakerjaan Malaysia tidak hanya memberikan tunjangan pengangguran dan subsidi upah untuk mempertahankan pekerja tetapi juga membiayai pelatihan sejalan dengan persyaratan jaga jarak fisik, termasuk pelatihan digital untuk serangkaian keahlian (Malaysia 2020a).
- Survei penilaian cepat yang dilakukan oleh ILO di Irak, Yordania, Lebanon, dan negara-negara lain dapat menghantarkan pada langkah-langkah yang disesuaikan untuk memperkuat perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan bagi pengungsi, migran dan pekerja nasional di berbagai sektor dan pekerjaan (ILO 2020d).

### **Memobilisasi sumber daya di tingkat nasional dan global berdasarkan solidaritas**

Bahkan sebelum pandemi COVID-19, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi kesenjangan pembiayaan yang sangat besar dalam

perlindungan sosial, sebesar 527 miliar dolar Amerika atau 1,6 persen dari produk domestik bruto negara-negara berkembang (Durán Valverde et al. 2019). Krisis ini memberikan tekanan tambahan yang besar pada anggaran nasional dalam konteks keterbatasan ruang fiskal.

Sebagian besar pemerintah perlu segera meningkatkan pengeluaran perlindungan kesehatan dan sosial, sementara pendapatan dari pajak dan iuran jaminan sosial menurun tajam (ILO 2020h). Hal ini akan menuntut langkah-langkah luar biasa untuk memastikan mobilisasi sumber daya segera untuk kesehatan dan perlindungan sosial (IMF 2020a; Gaspar dan Mauro 2020).

Di tingkat nasional, banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah meluncurkan respons dan langkah-langkah pemulihan untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi krisis COVID-19. Namun, karena mereka berada di bawah tekanan eksternal yang sangat besar karena runtuhnya perdagangan global, menurunnya pengiriman uang, pembalikan tajam arus modal dan depresiasi mata uang, pemerintah negara berkembang jauh lebih sedikit memiliki kelonggaran untuk melakukan kebijakan semacam itu (Ghosh 2020a).

### **Mempertimbangkan berbagai pilihan untuk meningkatkan ruang fiskal untuk perlindungan sosial dengan mengingat bahwa beberapa langkah perlu waktu untuk diterapkan**

Secara keseluruhan, negara-negara harus mempertimbangkan menggunakan berbagai metode berbeda untuk memobilisasi sumber daya untuk perlindungan sosial, dengan mempertimbangkan kapasitas kontribusi berbagai kelompok masyarakat.<sup>15</sup> Pada prinsipnya, sistem perlindungan sosial nasional harus dibiayai oleh sumber daya nasional. Namun, jika kapasitas ekonomi dan fiskal tidak mencukupi, negara-negara dapat mencari bantuan internasional untuk melengkapi upaya mereka sendiri untuk memperluas ruang fiskal.<sup>16</sup>

Dalam konteks krisis saat ini, mobilisasi sumber daya dalam negeri memasukkan realokasi pengeluaran dan pinjaman tambahan, dilengkapi dengan bantuan eksternal termasuk bantuan kemanusiaan. Pilihan lebih lanjut untuk meningkatkan ruang fiskal dalam jangka menengah dan panjang meliputi reformasi pajak atau meningkatkan pendapatan dari iuran jaminan sosial melalui kepatuhan yang lebih baik (Ortiz et al. 2019).<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Koordinasi semacam itu tercermin dalam Konvensi ILO tentang Promosi Ketenagakerjaan dan Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988 (No. 168).

<sup>15</sup> Catatan singkat tentang kesenjangan pembiayaan perlindungan sosial dalam konteks COVID-19 sedang dalam penyusunan.

<sup>16</sup> Rekomendasi No. 202, paragraf 11 dan 12

<sup>17</sup> Termasuk opsi-opsi berikut: (1) memperluas cakupan jaminan sosial dan pendapatan iuran; (2) meningkatkan penerimaan pajak; (3) menghilangkan aliran keuangan ilegal; (4) realokasi pengeluaran publik; (5) menggunakan cadangan devisa fiskal dan bank sentral; (6) meminjam dan merestrukturisasi hutang yang ada; (7) mengadopsi ekonomi makro yang lebih akomodatif dari pekerjaan; dan (8) meningkatkan bantuan dan transfer (Ortiz et al. 2019).

Tata kelola yang baik, transparansi dan efisiensi lembaga-lembaga publik juga sangat penting untuk meningkatkan ruang fiskal di tingkat nasional. Namun, beberapa dari langkah-langkah ini akan membutuhkan waktu untuk memiliki dampak, dan dengan pandemi yang sudah menghancurkan pendapatan, pekerjaan dan mata pencaharian, kecepatan merupakan intinya.

Krisis telah meningkatkan urgensi bantuan tambahan dari lembaga keuangan internasional, mitra pembangunan bilateral dan mekanisme pendanaan global lain untuk memastikan memadainya responsan negara. PBB telah meluncurkan Dana Respons dan Pemulihan COVID-19 sebagai respons terhadap krisis untuk memberikan bantuan dalam bentuk hibah. Prakarsa dari lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan, pada gilirannya, mencakup pembiayaan darurat dalam bentuk pinjaman oleh International Monetary Fund (IMF) melalui Fasilitas Kredit Cepat, Instrumen Pembiayaan Cepat dan instrumen-instrumen pembiayaan lainnya, serta fasilitas jalur cepat untuk respons COVID-19 yang diberikan oleh Bank Dunia (lihat kotak 4).

Seruan untuk moratorium sementara utang luar negeri negara berkembang (Reinhart dan Rogoff 2020) dan peningkatan besar-besaran dalam penerbitan hak penarikan khusus oleh IMF adalah di antara langkah-langkah yang diusulkan untuk meningkatkan ruang fiskal negara-negara berkembang (Ghosh 2020b).

### **Memastikan upaya berkelanjutan untuk membangun sistem perlindungan sosial nasional, termasuk landasan, di luar hibah darurat dan pinjaman selama krisis**

Fokus dan persyaratan khusus mekanisme-mekanisme pembiayaan dan pendanaan ini berbeda-beda. Kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka fokus pada respons krisis segera dan mengurangi dampak ekonomi dan sosial di tingkat mikro dan makro. Mereka mengkonfirmasi bahwa pembiayaan untuk perlindungan sosial dapat dibuat tersedia dengan cepat. Namun, meskipun dana-dana ini dapat memberikan kelonggaran dalam tingkat tertentu selama beberapa bulan, dana itu hanya merepresentasikan sebagian kecil kesenjangan pembiayaan untuk perlindungan sosial di negara-negara berkembang. Agar negara-negara berkembang mampu membangun landasan perlindungan sosial nasional dan menangani kesenjangan pembiayaan tersebut, maka upaya-upaya semacam itu penting untuk dipertahankan dan bahkan diperluas dan tidak dilakukan langkah penghematan terhadapnya. Perlindungan sosial merupakan investasi penting, terutama jika negara-negara berkembang ingin bisa lebih siap menghadapi krisis berikutnya. Dalam konteks ini, ruang lingkup mekanisme pembiayaan global yang melengkapi upaya nasional untuk menciptakan ruang fiskal untuk perlindungan sosial dalam skala yang jauh lebih besar daripada kerjasama pembangunan yang ada harus dieksplorasi.

### **Mendasarkan semua keputusan terkait alokasi sumber daya pada standar dan prinsip jaminan sosial yang disepakati secara internasional**

Yang paling relevan adalah Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202) dan Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102), yang mendefinisikan prinsip-prinsip yang harus

menopang pengembangan sistem perlindungan sosial berbasis hak yang berkelanjutan dan berbasis hak dalam jangka pendek dan panjang. Ini mencakup (a) universalitas dan non-diskriminasi, karena setiap anggota masyarakat dapat menjadi rentan; (b) dialog sosial dengan pekerja, pengusaha dan orang-orang yang bersangkutan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya itu adil, tidak diskriminatif dan berkontribusi terhadap kepercayaan sosial; (c) keberlanjutan finansial, fiskal, dan ekonomi jangka panjang, dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan sosial; dan (d) solidaritas dalam pembiayaan, yang berarti bahwa anggota masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan sesuai dengan kemampuan mereka dan menguntungkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Krisis COVID-19 secara khusus menyoroti perlunya memastikan landasan perlindungan sosial yang kuat yang menjamin sekurang-kurangnya jaminan sosial tingkat dasar untuk semua, sebagaimana tercermin dalam target 1.3 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Guna melindungi pengeluaran perlindungan sosial yang diperlukan untuk tujuan ini, mempertahankan dan lebih memperkuat landasan perlindungan sosial yang ditetapkan secara nasional harus diprioritaskan pada masa krisis dan setelahnya, terutama dalam periode konsolidasi fiskal.<sup>18</sup>

### **Mempercepat kemajuan dalam membangun sistem perlindungan sosial, termasuk landasan untuk meningkatkan ketahanan**

### **Merebut kesempatan yang diberikan oleh seruan penyadaran COVID-19 untuk mempercepat pembentukan sistem perlindungan sosial, termasuk landasan**

Pandemi COVID-19 berfungsi sebagai seruan penyadaran yang mengingatkan komunitas global akan urgensi percepatan kemajuan dalam membentuk sistem perlindungan sosial, termasuk landasan. Pengambil kebijakan di negara-negara berkembang harus sedapat mungkin merancang respons darurat krisis dengan perspektif jangka panjang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan kerja layak, termasuk dengan mendukung transisi dari perekonomian informal ke perekonomian formal. Bila memungkinkan, intervensi kesehatan dan distribusi bantuan tunai harus menggunakan dan memperkuat sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang ada, sekalipun terbatas, dan harus mengembangkannya lebih lanjut. Penting untuk bekerja di seluruh inti pembangunan kemanusiaan untuk memastikan bahwa langkah-langkah darurat dirancang untuk juga berkontribusi pada tujuan jangka menengah dan panjang. Ini akan meminimalkan duplikasi dan kesenjangan, memastikan pendekatan yang adil dan hemat biaya dan menghindari masalah keberlanjutan saat negara-negara bangkit dari krisis.

<sup>18</sup> Rekomendasi No. 202 memberikan panduan tentang masalah ini, yang juga mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia lebih luas yang relevan.

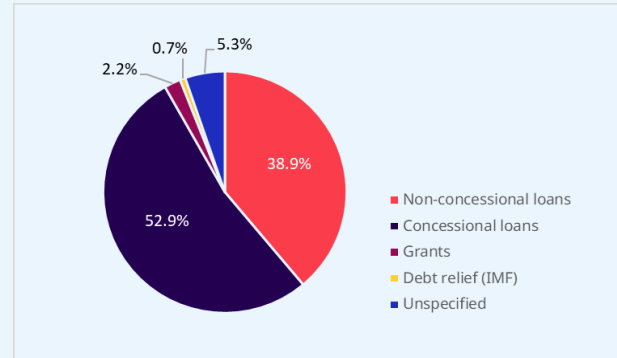
**Kotak 4: Pendanaan dalam negeri dan internasional untuk respons COVID-19**

Negara-negara di seluruh dunia memobilisasi dana di tingkat nasional dan internasional untuk menanggapi kebutuhan kesehatan, sosial dan ekonomi yang timbul dari pandemi COVID-19. Sampai hari ini, lebih dari 146 negara telah memperkenalkan langkah-langkah fiskal dalam negeri, dengan total sekira 8 triliun dollar Amerika, yang meliputi reprioritisasi pengeluaran, defisit fiskal yang lebih tinggi, dan langkah-langkah lainnya (IMF 2020b). Lebih dari separuh langkah ini dialokasikan untuk layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Berbagai bank pembangunan internasional, regional dan subregional dan lembaga kerjasama pembangunan internasional juga telah mengumumkan paket keuangan sebagai respons terhadap krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Pada tanggal 7 Mei 2020, lembaga-lembaga ini menjanjikan sekira 1,35 triliun dolar Amerika untuk membantu negara-negara mengatasi dampak kesehatan dan sosial ekonomi yang disebabkan oleh krisis, termasuk paket bantuan darurat, lini kredit, kelonggaran layanan hutang dan hibah. Ini termasuk total 1 triliun dolar Amerika yang dijanjikan oleh IMF dan sekitar 160 miliar dolar Amerika oleh Bank Dunia, yang dananya diperkirakan akan digunakan selama 15 bulan ke depan. Namun, hanya sebagian kecil dari dana internasional yang dijanjikan telah dialokasikan secara efektif ke negara-negara, berjumlah 32,2 miliar dolar Amerika hingga saat ini, di mana sekira 17 miliar dolar Amerika telah dilakukan dalam bentuk pinjaman lunak dan 12,5 miliar dolar Amerika sebagai pinjaman non-lunak (lihat gambar 1).

Total janji internasional merepresentasi 14,4 persen dari total sumber daya dalam negeri dan internasional yang dimobilisasi untuk mengatasi dampak krisis COVID-19.

Gambar 1: Total pembiayaan yang disetujui untuk respons COVID-19 dari bank pembangunan internasional, regional dan subregional dan lembaga kerjasama pembangunan internasional, tidak termasuk sumber daya dalam negeri (persentase total).



Sumber: Berdasarkan informasi dari IMF, Bank Dunia dan sumber lainnya (daftar tersedia berdasarkan permintaan).

<sup>a</sup> Meliputi African Development Bank, Agence française de développement, Arab Bank for Economic Development in Africa, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment B, Caribbean Development Bank, Central American Bank for Economic Integration, Development Bank of Latin America, European Commission, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany, International Monetary Fund, Inter-American Development Bank, International Monetary Fund, Islamic Development Bank, New Development Bank, Nordic Investment Bank, OPEC Fund, United States Agency for International Development, West African Development Bank dan World Bank Group.

### Mempercepat kemajuan menuju sistem perlindungan sosial universal untuk pemulihan yang lebih baik

Pendekatan berbasis hak yang berpusat pada hak asasi manusia dan standar ILO, dengan negara sebagai penjamin hak-hak ini, sangat penting untuk memperkuat sistem nasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2020a, 2020b; ILO 2020h). Koordinasi dengan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk retensi pekerjaan, promosi ketenagakerjaan dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif, akan mempercepat pemulihan. Dialog sosial yang inklusif di tingkat negara akan sangat penting untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan alokasi

sumber daya untuk secara sistematis melayani perluasan perlindungan sosial. Krisis saat ini, telah menunjukkan bahwa tidak hanya orang miskin dan rentan tetapi semua kategori penduduk membutuhkan perlindungan, yang memperkuat seruan ke arah sistem perlindungan sosial universal, termasuk landasan (lihat kotak 5). Memasukkan program perlindungan sosial dalam perundang-undangan nasional dapat menghindari perlunya pendekatan *ad hoc* dan terfragmentasi. Hal ini akan memastikan bahwa respons krisis memiliki dampak pembangunan yang abadi dan tidak ada seorangpun yang tertinggal.

**Kotak 5: Kemitraan Global untuk Perlindungan Sosial Universal untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (USP2030)**

Kerangka hak asasi manusia internasional, standar jaminan sosial internasional, dan Agenda 2030 menetapkan kerangka jelas yang disepakati secara internasional untuk mencapai perlindungan sosial universal (ILO 2019b). Krisis ini menunjukkan bahwa negara-negara perlu menjalankan komitmen mereka untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial untuk semua yang dimiliki secara nasional, termasuk landasan-landasannya.

Kemitraan Global untuk Perlindungan Sosial Universal untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (USP2030), diketuai bersama oleh ILO dan Bank Dunia dan menyatukan pemerintah, organisasi internasional, mitra sosial dan masyarakat sipil, menyerukan kepada negara dan mitra pembangunan untuk melakukan lima aksi berikut untuk mendukung komitmen global tentang perlindungan sosial universal (USP2030 2019):

**AKSI 1. Perlindungan sepanjang siklus hidup:** Membangun sistem perlindungan sosial universal, termasuk landasan, yang memberikan perlindungan yang memadai di seluruh siklus hidup, yang memadukan asuransi sosial, bantuan sosial dan cara-cara lain, yang dicantumkan dalam strategi dan perundang-undangan nasional;

**AKSI 2. Jangkauan universal:** Memberikan akses universal ke perlindungan sosial dan memastikan bahwa sistem perlindungan sosial tersebut berbasis hak, responsif gender dan inklusif, tanpa ada satupun yang tertinggal;

**AKSI 3. Kepemilikan nasional:** Mengembangkan strategi dan kebijakan perlindungan sosial berdasarkan prioritas dan keadaan nasional bekerjasama erat dengan semua pelaku terkait;

**AKSI 4. Pendanaan berkelanjutan dan adil:** Memastikan keberlanjutan dan keadilan sistem perlindungan sosial dengan memprioritaskan bentuk pembiayaan dalam negeri yang handal dan merata, dilengkapi dengan kerjasama dan dukungan internasional jika diperlukan;

**AKSI 5. Partisipasi dan dialog sosial:** Memperkuat tata kelola sistem perlindungan sosial melalui kepemimpinan kelembagaan, koordinasi multi-sektor dan partisipasi mitra sosial dan organisasi terkait dan representatif lainnya, untuk menghasilkan dukungan berbasis luas dan mempromosikan efektivitas layanan.

Urgensi saat ini seharusnya tidak memberi jalan untuk berpuas diri di masa depan. Contoh-contoh negara di atas sekali lagi menunjukkan dengan jelas bahwa negara-negara dengan sistem perlindungan sosial yang kuat dan komprehensif yang telah ada jauh lebih mampu merespons dan pulih dari guncangan atau krisis. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perlu menangkap momentum yang ditimbulkan oleh krisis saat ini, yang terbukti dalam kesadaran publik dan politik yang diperbarui tentang pentingnya perlindungan sosial dan investasi sumber daya yang sesuai, untuk memajukan dan memperkuat sistem perlindungan sosial di seluruh dunia dan memastikan kesiapan untuk krisis di masa depan, khususnya kemampuan untuk merespons tantangan eksistensial yang jauh lebih mendalam yang ditimbulkan oleh krisis iklim.

*Dokumen ini diterjemahkan dengan dukungan dari Fast Retailing Co., Ltd. melalui Proyek ILO/UNIQLLO (Unemployment Protection in Indonesia: Quality Assistance for Workers Affected By Labour Adjustments)*

## Daftar Pustaka

- Alfers, Laura. 2020. "Pandemic: Informal Workers Urgently Need Income Replacement — and More Protections". *WIEGO Blogs*, 23 Maret.
- Argentina, National Social Security Administration. 2020. "Ingreso Familiar de Emergencia".
- Brazil, Federal Savings Bank. 2020. "Auxílio Emergencial Do Governo Federal".
- Cabo Verde, Ministry of Family and Social Inclusion. 2020. "Governo Implementa Medidas de Proteção Social para as Famílias e a Proteção do Rendimento".
- Kosta Rika, Ministry of Labour and Social Security. 2020. "Plan Proteger".
- Dominican Today. 2020. "COVID-19: The Current Situation in the Dominican Republic". 5 April.
- Durán Valverde, Fabio, José Pacheco-Jimenez, Taneem Muzaffar, and Hazel Elizondo-Barboza. 2019. *Measuring Financing Gaps in Social Protection for Achieving SDG Target 1.3: Global Estimates and Strategies for Developing Countries*. ILO.
- El Mercurio. 2020. "¿Cómo Aplicar al Bono de Contingencia Ante Covid-19?". 23 Maret.
- FAO. 2020. *Social Protection and COVID-19 Response in Rural Areas*.
- Forbes. 2020. "COVID-19 : Comment le Maroc Met en Oeuvre un Plan Massif Pour Soutenir l'économie et Protéger Les Populations". 6 April.
- Gaspar, Vitor, and Paolo Mauro. 2020. "Fiscal Policies to Protect People During the Coronavirus Outbreak". *IMF Blog* 2 February.
- Gentilini, Ugo, Mohamed Almenfi, and Pamlea Dale. 2020. "Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures". Updated 24 April.
- Ghosh, Jayati. 2020a. "The COVID-19 Debt Deluge". *Project Syndicate*, 16 Maret.
- . 2020b. "COVID-19 Is the IMF's Chance for Redemption". *Project Syndicate*, 9 April.
- Global Commission on the Future of Work. 2019. "Work for a Brighter Future". ILO.
- High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. 2017. "Working for Health and Growth: Investing in the Health Workforce". Geneva: World Health Organization.
- IOE, ITUC, and IndustriALL Global Union. 2020. "COVID-19: Action in the Global Garment Industry". ILO.
- Horn Observer. 2020. "Somali President Unveils Social Safety Net Program to Reduce Poverty and Improve Human Capital". 19 April.
- ILO. 2017. "World Social Protection Report 2017-19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals".
- . 2018. "Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work".
- . 2019a. *A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better Future of Work for All*.
- . 2019b. "Building Social Protection Systems: International Standards and Human Rights Instruments".
- . 2019c. "Extending Social Security Coverage to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience".
- . 2019d. "Extending Social Security to Domestic Workers: Lessons from International Experience".
- . 2019e. "Extending Social Security to the Self-Employed Workers: Lessons from International Experience".
- . 2019f. "Extending Social Security to Workers in Micro and Small Enterprises: Lessons from International Experience".
- . 2020a. "COVID-19 and the World of Work. Country Policy Responses: Thailand".
- . 2020b. "COVID-19 Crisis and the Informal Economy: Immediate Responses and Policy Challenges".
- . 2020c. "Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis around the World", 30 April 2020.
- . 2020d. "Facing Double Crises: Rapid Assessment of the Impact of COVID-19 on Vulnerable Workers in Jordan".
- . 2020e. "ILO Monitor 2nd Edition: COVID-19 and the World of Work Updated Estimates and Analysis". 7 April.
- . 2020f. "ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. Third Edition Updated Estimates and Analysis". 29 April.
- . 2020g. "Sickness Benefits during Sick Leave and Quarantine: Country Responses and Policy Considerations in the Context of COVID-19". *Social Protection Spotlight*, April.
- . 2020h. "Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis: Country Responses and Policy Considerations". *Social Protection Spotlight*, April.
- . 2020i. "Social Security Policy Monitor China". Maret.
- . 2020j. "Towards Universal Health Coverage: Social Health Protection Principles". *Social Protection Spotlight*, Januari.
- . 2020k. "COVID-19 and the Health Sector". *ILO Sectoral Brief*, 11 April.
- . 2020l. "Adjusting Labour Practices in Employment-Intensive Works in Response to COVID-19", 12 April.
- ILO, and UNICEF. 2019. "Towards Universal Social Protection for Children: Achieving SDG 1.3".
- IMF. 2020a. "Policies to Support People During the COVID-19 Pandemic". *Fiscal Monitor*, April 2020.
- . 2020b. "Confronting the Crisis: Priorities for the Global Economy". 9 April,
- Irak, 2020. "Covid-19: Iraq's Higher Committee for Health and National Safety Announces Emergency Grant to Families Impacted by Curfew". 12 April.
- Jamaika, Ministry of Education, Youth & Information. 2020. "Parents of PATH Students to Be given Cash to Prepare Breakfast and Lunch".

- Karan, Anup, Himanshu Negandhi, Rajesh Nair, Anjali Sharma, Ritika Tiwari, and Sanjay Zodpey. 2019. "Size, Composition and Distribution of Human Resource for Health in India: New Estimates Using National Sample Survey and Registry Data". *BMJ Open*, 27 Mei.
- Kelombang, Kagisanyo, and Cheng Boon Ong. 2018. "South Africa: Expanded Public Works Programmes". Country brief.
- Malaysia, Social Security Organization. 2020a. "Employment Insurance System (EIS)".
- . 2020b. "Wage Subsidy Programme Expansion".
- Mujawase, Francisca. 2020. "Rwanda's Established Social Protection Floor: Key Pillar in Fighting the Impact of COVID-19". 2 April.
- Namibia, Ministry of Finance. 2020. "Launch Statement: Emergency Income Grant of the Economic Stimulus and Relief Package".
- Nugroho, Dhefi. 2020. "The Government Spent Rp 43.6 Trillion for Cheap Basic Food Card Program". *Timlo.Net*, 10 April.
- Ortiz, Isabel, Anis Chowdhury, Fabio Durán Valverde, Taneem Muzaffar, and Stefan Urban. 2019. *Fiscal Space for Social Protection: A Handbook for Assessing Financing Options*. ILO.
- Oxfam. 2020. "Dignity Not Destitution: An 'Economic Rescue Plan for All' to Tackle the Coronavirus Crisis and Rebuild a More Equal World". *Oxford Media Briefing*, 9 April.
- Parpia, Alyssa S, Martial L Ndeffo-Mbah, Natasha S Wenzel, and Alison P Galvani. 2016. "Effects of Response to 2014- 2015 Ebola Outbreak on Deaths from Malaria, HIV/AIDS, and Tuberculosis, West Africa". *Emerging Infectious Diseases* 22 (3): 433-41.
- Filipina, PhilHealth. 2020a. "Official Statement on Coverage on Test for Covid-19". 19 February.
- Filipina, PhilHealth. 2020b. "PhilHealth to Release P30 Billion to Hospitals to Fight Covid-19". 18 Maret.
- Filipina, Filipina News Agency. 2020c. "DSWD Releases Emergency Subsidy of 4Ps Beneficiaries".
- Filipina, Department of Labour. 2020d. "Department Order No. 210: Guidelines for the Implementation of the Tulong Panghanapbuhay Sa Ating Displaced/Disadvantaged Workers Program (Tupad) #Barangay Ko, Bahay Ko (Tupad #Bkbb) Disinfecting / Sanitation Project". 18 Maret.
- Reinhart, Carmen M., and Kenneth Rogoff. 2020. "Suspend Emerging and Developing Economies". *Debt Payments. Project Syndicate*, 13 April 2020.
- Shange, Naledi. 2020. "Mboweni Gives Clarity on Social Grant Top-Ups That Will End in Six Months". *Times LIVE*, 24 April.
- Afrika Selatan, Department of Employment and Labour. 2020a. "Easy - Aid Guide: Reduced Work Time Benefits / Illness Benefits / Dependants Benefits".
- . 2020b. "Social Grants - Coronavirus COVID-19".
- Swaminathan, Madhura, and Deepak Johnson. 2020. "Kerala's Approach to Containing Corona". *Business Standard*, 22 April.
- The Grand Bargain. Forthcoming. "Increasing Links between Humanitarian Cash and Social Protection for an Effective Response to the COVID-19 Pandemic".
- The Thaiger. 2020. "New Covid-19 Specialist Hospital to Open as Thai Government Steps up Response", 16 Maret.
- Togo. 2020. "Le Programme Novissi".
- UNDP. 2014. *Assessing the Socio-Economic Impacts of Ebola Virus Disease in Guinea, Liberia and Sierra Leone: The Road to Recovery*.
- United Nations. 2020a. "COVID-19 and Human Rights: We Are All in This Together".
- . 2020b. "Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-Economic Impacts of COVID-19".
- USP2030. 2019. "Together to Achieve Universal Social Protection by 2030 (USP2030) - A Call to Action". 5 February.
- WHO. 2020. Global Health Expenditure Database.
- WHO, and World Bank. 2017. *Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report*.
- WIEGO. 2020a. "Government Responses to COVID-19 Crisis".
- . 2020b. "Informal Worker Demands during COVID-19 Crisis".

Departemen Perlindungan Sosial

► [socpro@ilo.org](mailto:socpro@ilo.org)

► Social Protection Platform:

[www.social-protection.org](http://www.social-protection.org)

International Labour Organization

4 route des Morillons

1211 Genève 22

[www.ilo.org](http://www.ilo.org)

Kunjungi website kami untuk pembaruan berkala dari respons COVID-19 dan dunia kerja

► [ilo.org/global/topics/coronavirus](http://ilo.org/global/topics/coronavirus)

► [www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=62&lang=EN](http://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=62&lang=EN)